

Katalog: 3205005.31



PROFIL **KEMISKINAN** PROVINSI DKI JAKARTA

2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**



PROFIL KEMISKINAN PROVINSI DKI JAKARTA

2021

PROFIL KEMISKINAN

PROVINSI DKI JAKARTA 2021

ISSN/ISBN : -
Nomor Publikasi : 31000.2237
Katalog BPS : 3205005.31

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : iv + 34 halaman

Naskah : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Penyunting : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
Desain Kover : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Diterbitkan Oleh : © Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Pencetak : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

KATA PENGANTAR

Profil Kemiskinan DKI Jakarta 2021 merupakan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, berisi data tentang jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, karakteristik penduduk miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta Tahun 2021. Data-data tersebut merupakan hasil pengolahan dari Survei Susenas Maret dan September 2021. Publikasi ini menyajikan tabulasi dan grafik tingkat kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta serta tabulasi dan grafik karakteristik penduduk miskin di DKI Jakarta selama tahun 2021.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Kepada semua kontributor, kami sampaikan terima kasih. Publikasi ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai kalangan pengguna data untuk beragam keperluan. Tanggapan dan saran yang konstruktif kami harapkan dari para pembaca untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, Oktober 2022

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta



Anggoro Dwitjahyono

TIM PENYUSUN

Pengarah : Anggoro Dwitjahyono

Penanggungjawab Teknis : Dwi Paramita Dewi

Editor : Dwi Paramita Dewi

Penulis : Theresia Parwati

Pengolah Data : Theresia Parwati

Layout : Ahmad Saefudin

Infografis : Ahmad Saefudin

Gambar Kulit : Dimas Hafizh

<https://jakarta.bpp.go.id>

1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan bukanlah sekedar statistik atau angka semata. Kemiskinan adalah persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi kehidupan rakyat, masalah hidup dan mati bagi sebagian rakyat yang kurang beruntung. Kemiskinan terjadi salah satunya karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat. Karena itu, masalah kemiskinan harus ditangani secara substantif dan mendasar, dan bukan sekedar siasat statistik dan manipulasi angka-angka demi popularitas. Telah banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun faktanya fenomena kemiskinan masih tetap eksis dalam kehidupan manusia dan seakan tidak akan pernah sirna dari kehidupan manusia.

“Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang terpercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pada akhirnya, data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi

kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka” (BPS, 2008a).

Sejak tahun 2004, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan melalui Keputusan Gubernur Nomor 1958/2002 yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 1791/2004 tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk memotret wajah kemiskinan dan membantu para pengambil keputusan untuk menentukan langkah yang tepat didalam menanggulangi masalah kemiskinan.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Tujuan Penulisan publikasi ini antara lain untuk:

- a. Mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021;
- b. Mengetahui karakteristik penduduk miskin di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021;

- c. Mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan secara regional di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Karakteristik penduduk miskin dan tidak miskin, distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk dan beberapa indikator kemiskinan lainnya juga disajikan dengan menggunakan data Susenas Panel Modul Konsumsi dan Kor pada Maret 2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang berbagai penelitian atau metodologi yang pernah dibangun dan disajikan pada publikasi sebelumnya sekaligus diperkaya dengan hasil penelitian dan pengembangan metodologi terbaru yang sudah dipublikasikan.

Bab III menjelaskan tentang kemiskinan di Jakarta, perkembangan tingkat kemiskinan, perkembangan Indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.

Bab IV menjelaskan tentang perkembangan distribusi dan ketimpangan pendapatan di DKI Jakarta.

Bab V menjelaskan tentang seberapa dalam kemiskinan di Jakarta.

Bab VI menjelaskan tentang Profil Kemiskinan di Jakarta berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perumahan pada rumah tangga miskin di DKI Jakarta.

<https://jakarta.bps.go.id>

2.1. Metode Penghitungan Kemiskinan

a. Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

b. Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret.

c. Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran

kebutuhan minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran).

d. Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-*inflate* dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}}$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM =Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari.

j =Daerah (perkotaan atau pedesaan).

p =Provinsi ke-p.

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/ sub kelompok non makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan terhadap total pengeluaran komoditi/ sub kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil SPDKP 2004, yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

- GKNM_{jp} = Pengeluaran minimum non makanan atau Garis Kemiskinan Non Makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.
- V_{kjp} = Nilai Pengeluaran per komoditi/ sub kelompok non makanan daerah j dan provinsi p.
- r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/ sub kelompok non makanan k menurut daerah (hasil SPDKP 2004) dan daerah j (kota + desa).
- k = Jenis komoditi non makanan terpilih.
- j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).
- p = Provinsi (perkotaan atau pedesaan).

Garis Kemiskinan merupakan Penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

- %PM_p = Persentase penduduk miskin di provinsi p.
- PM_p = Jumlah Penduduk Miskin di provinsi p.
- P_p = Jumlah Penduduk di provinsi p.

2.2. Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI- P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*- P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*- P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

α = 0,1,2

z = Garis Kemiskinan.

- y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
- n = Jumlah penduduk.

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0), jika $\alpha = 1$ diperoleh indeks kedalaman kemiskinan (P_1) dan jika $\alpha = 2$ disebut indeks keparahan kemiskinan (P_2).

2.3. Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

A: Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar dari X.

N: Jumlah penduduk total.

b: parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk terkaya mendapatkan paling banyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini kemudian disebut sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini dilakukan dengan pendekatan melalui data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan empat ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*), Ukuran Bank Dunia, Indeks Theil dan Indeks –L.

a. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR = Koefisien Gini.

fp_i = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i.

fc_i = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i.

Fc_{i-1} = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1).

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendataan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks Gini adalah nol, maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan yang sempurna. Untuk publikasi resmi Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Loenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform yang mewakili persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva

lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. garis diagonal mewakili pemetaan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien gini bernilai 0 yang berarti pemetaan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien gini bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata – rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (sub group).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar

waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

b. Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia, dalam upaya mengukur ketimpangan pendapatan, membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih kecil dari 12 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan tinggi.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah antara 12 sampai dengan 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan moderat/ sedang/ menengah.
- Bila persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah lebih besar dari 17 persen, maka dikatakan terdapat ketimpangan pendapatan rendah.

c. Indeks Theil dan Indeks- L

Ada sejumlah ukuran ketimpangan yang memenuhi semua kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik (di atas). Diantaranya yang paling banyak digunakan adalah Indeks Theil dan Indeks-L (ukuran deviasi log rata-rata). Kedua ukuran tersebut masuk dalam famli ukuran ketimpangan "*generalized enthropy*". Ukuan tersebut secara umum ditulis sebagai berikut:

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

Dimana \bar{y} adalah rata-rata pendapatan (pengeluaran).

Nilai GE bervariasi antara 0 dan ∞ dengan 0 mewakili distribusi yang merata dan nilai yang lebih tinggi mewakili tingkat ketimpangan yang lebih tinggi. Parameter α dalam kelompok ukuran GE mewakili penimbang yang diberikan pada jarak antara pendapatan pada bagian yang berbeda dari distribusi pendapatan. Untuk nilai α yang lebih rendah, GE lebih sensitif terhadap perubahan pada ekor bawah dari distribusi (penduduk miskin), dan untuk nilai α yang lebih tinggi GE lebih sensitif terhadap perubahan yang berakibat pada ekor atas distribusi (penduduk kaya). Nilai α yang paling umum digunakan adalah 0 dan 1.

- GE(1) disebut sebagai Indeks Theil, yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right),$$

- GE (0) juga dikenal dengan indeks-L, disebut ukuran deviasi log rata-rata (*mean log deviation*) karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y):

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

<https://jakarta.bps.go.id>

3 KEMISKINAN JAKARTA

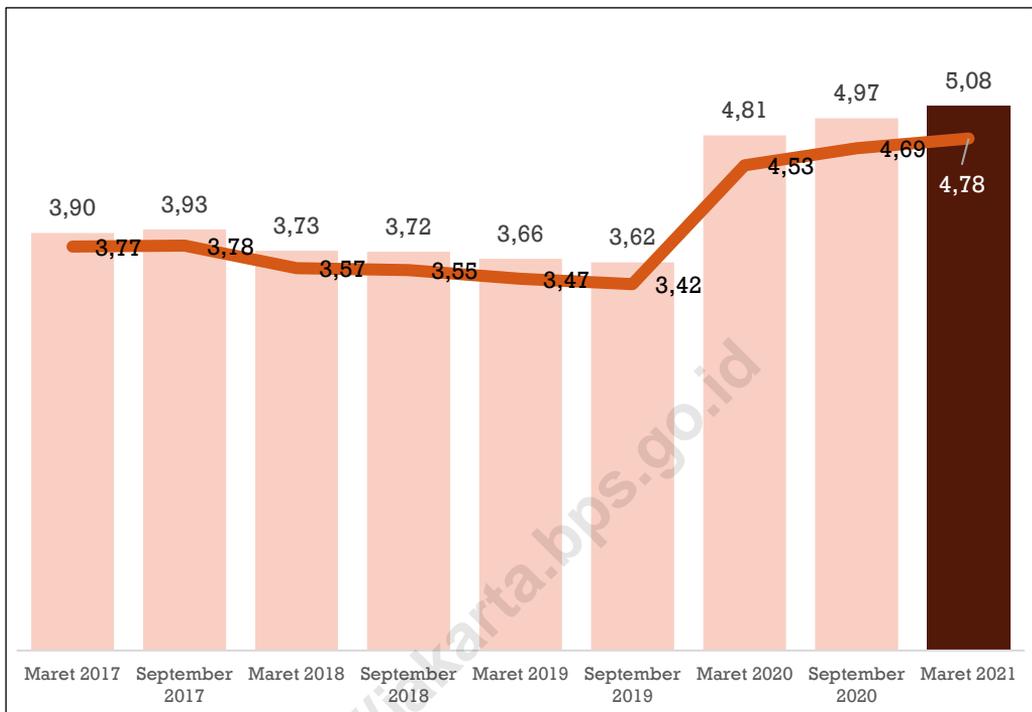
3.1. Perkembangan Kemiskinan di Jakarta, 2020-2021

Wabah virus corona yang lebih dikenal dengan pandemi Covid-19 telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi ini menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Hal ini berdampak pada cepatnya lonjakan kemiskinan pasca bencana Covid-19.

Sesungguhnya, angka kemiskinan Jakarta sudah cenderung melandai sejak tahun 2000 sebesar 4,96 persen dan turun menjadi 3,47 persen di tahun 2019 menjadi 3,47 persen. Namun, sejak Maret 2020 atau sejak Covid-19 mulai mewabah, persentase penduduk miskin baik untuk nasional maupun DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan meningkat.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2021 mencapai 4,78 persen yang berarti mencakup sejumlah 501,92 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2020 (4,69% atau 496,84 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat tipis sebesar 0,09 poin atau meningkat sebesar 5,08 ribu orang.

Grafik Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin, 2017-2021

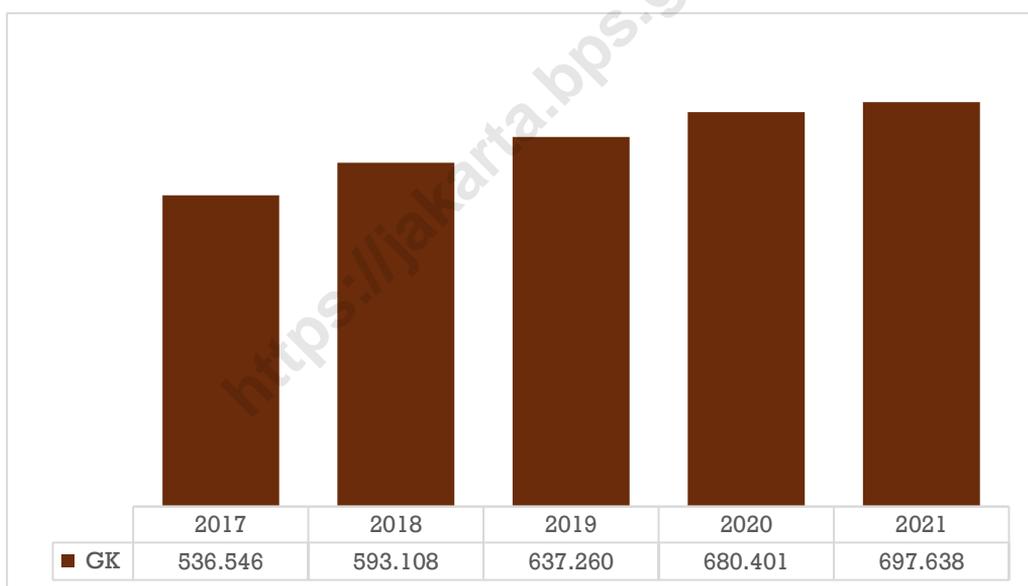


Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan dibentuk dari komponen Makanan dan Non Makanan, yang kemudian disebut Garis Kemiskinan Makanan untuk komponen Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan untuk komponen Non Makanan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per

kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Grafik Garis Kemiskinan Jakarta, 2017-2021

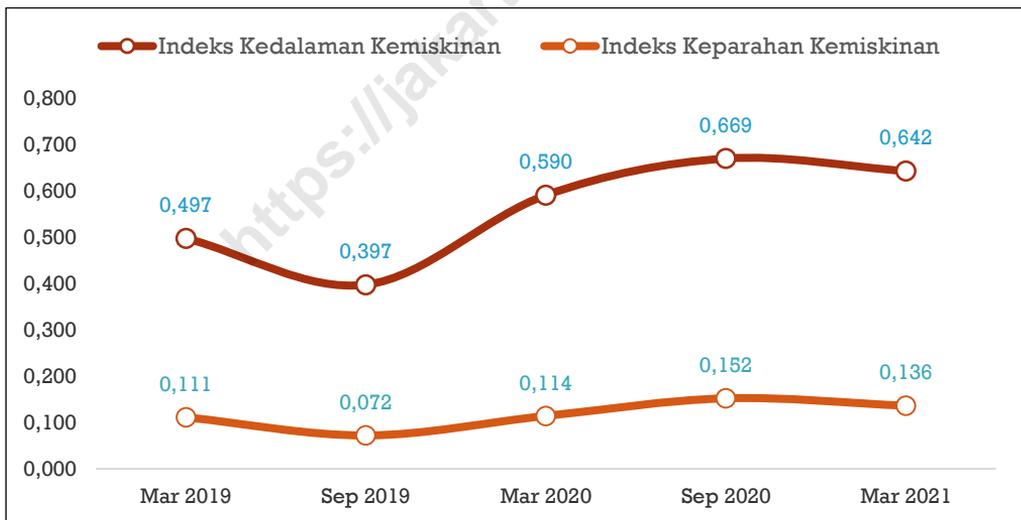


Secara umum, besaran nilai garis kemiskinan (GK) selalu naik. Faktor inflasi merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap naiknya nilai garis kemiskinan. Garis Kemiskinan pada Maret 2021 sebesar 697.638 naik dibandingkan tahun 2020 sebesar 680.401.

3.2. Perkembangan Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Grafik Indeks Keparahan dan Kedalaman Kemiskinan Jakarta, 2019-2021



Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P₁*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) menunjukkan penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 0,669 tahun 2020 menjadi 0,642 tahun 2021. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan juga turun dari 0,152 pada Maret 2020 menjadi 0,136 pada Maret 2021.

3.3. Perkembangan Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

a. Perkembangan Koefisien Gini Periode Maret 2017-2021

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Koefisien Gini. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai Koefisien Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Koefisien Gini DKI Jakarta pada Maret 2021 adalah sebesar 0,409 atau naik 0,09 dibandingkan Maret 2020.

Grafik Gini Ratio Jakarta, 2017-2021



3.4. Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2020-2021

Selain Koefisien Gini ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia.

Pada September 2021, persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,16 persen yang berarti pendapatan penduduk DKI Jakarta berada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pendapatan pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2021 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 16,09. Begitu juga jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang sebesar 16,49 persen. Persentase pendapatan

penduduk kelompok terbawah ini mengalami kenaikan pada September 2020.

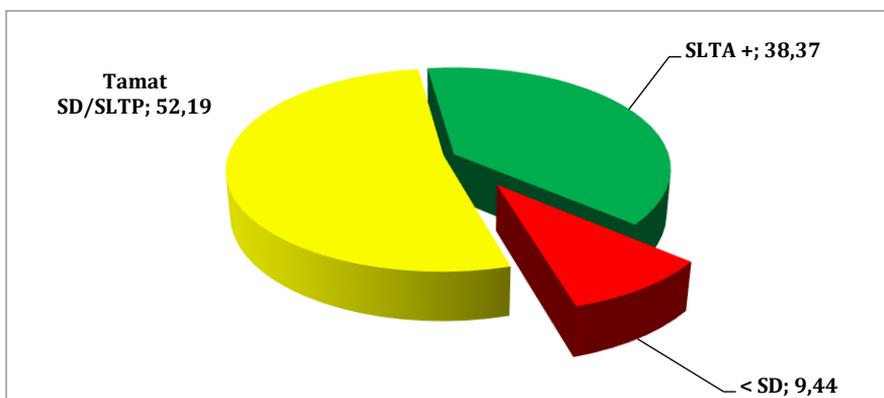
<https://jakarta.bps.go.id>

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan.

4.1. Pendidikan Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas

Tingkat pendidikan juga berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih baik biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Karakteristik pendidikan yang diuraikan disini adalah distribusi persentase penduduk miskin berdasarkan pendidikan yang ditamatkannya.

Gambar 6. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan yang ditamatkan, Tahun 2021

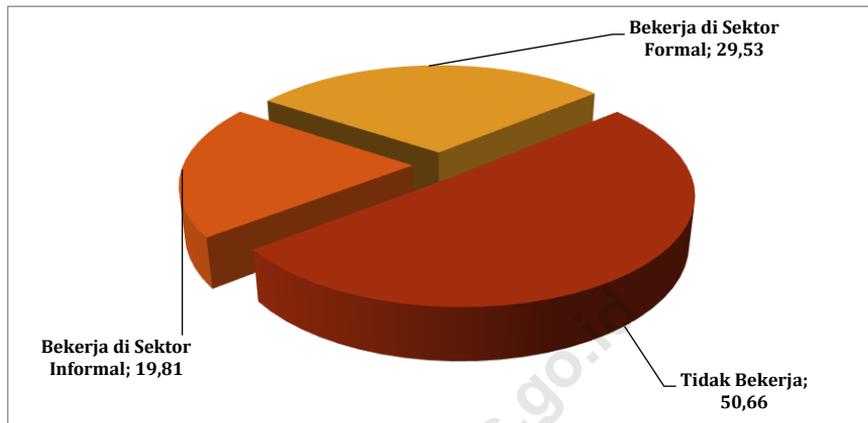


Dari hasil olah Susenas Maret 2021, pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk Miskin Usia 15 tahun ke atas adalah Tamat SD/SLTP yaitu sebanyak 52,19 persen. Penduduk miskin yang menamatkan pendidikan SLTA ke atas ada sebanyak 38,37 persen dan penduduk miskin yang hanya menamatkan pendidikan dibawah SD hanya sebesar 9,44 persen.

4.2. Kegiatan Bekerja Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas

Sumber penghasilan utama rumah tangga menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Cerminan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga.

Gambar 7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Status Bekerja, Tahun 2017



Dari gambar 7 terlihat bahwa penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor Informal ada sebanyak 19,81 persen, di sektor Formal sebanyak 29,53 persen dan sebanyak 50,66 persen penduduk tidak bekerja. Hampir setengah dari penduduk miskin yang berusia 15 tahun ke atas yang berstatus tidak bekerja.

Sukirno (2004), menyatakan bahwa efek buruk dari pengangguran adalah berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran/kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat yang turun karena menganggur akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan timbul kekacauan politik dan sosial dan mempunyai efek yang buruk pada

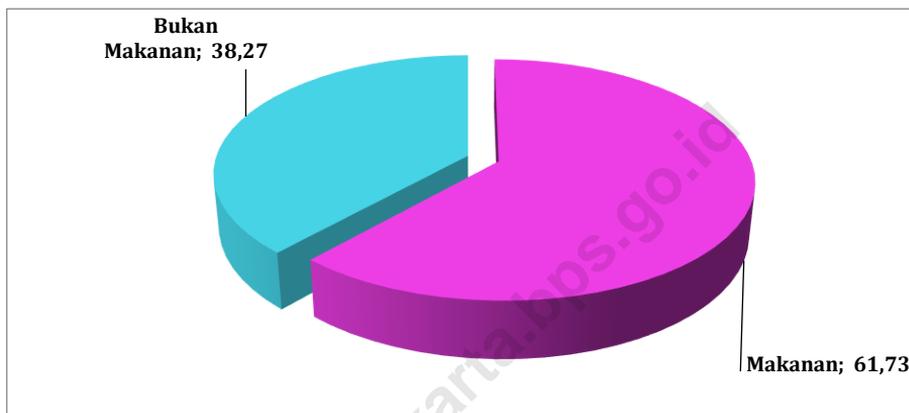
kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Suparno (2010) menemukan bahwa banyaknya pengangguran akan berdampak pada peningkatan kemiskinan di Indonesia.

4.3. Pengeluaran Per Kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin

Banyak alasan yang menyebabkan analisis makro ekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan pertama, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Alasan yang kedua, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya (Sadono Sukirno, 2000). Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Semakin kecil pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan Makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di negara yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena

untuk memenuhi kebutuhan gizi (BPS).

Gambar 8. Persentase Pengeluaran Per Kapita Makanan dan Non Makanan Penduduk Miskin, Tahun 2021



Dari hasil olah Susenas Maret Tahun 2021 terlihat bahwa pengeluaran per kapita penduduk miskin lebih besar di pengeluaran makanan (61,73 persen dari total pengeluaran) dibandingkan pengeluaran non makanan (38,27 persen dari total pengeluaran makanan).

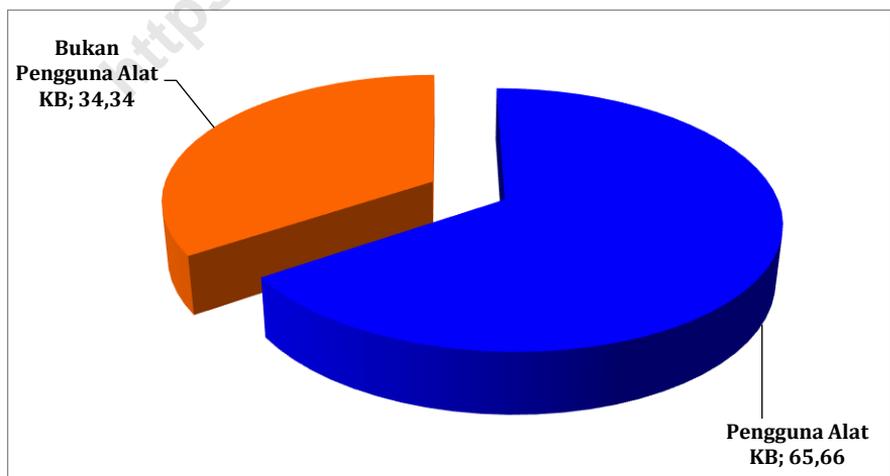
4.4. Penggunaan Alat KB Penduduk Miskin pada Wanita Usia Subur

Pengendalian jumlah penduduk menjadi isu yang sangat penting karena laju pertumbuhan penduduk yang terkendali menjadi kunci dari

kualitas sumber daya manusia di suatu area. Semakin tinggi jumlah penduduk di suatu area maka akan semakin rendah kualitas sumber daya manusianya. Di Indonesia, jumlah penduduk yang begitu besar, dengan kualitas penduduk rendah, itu berbahaya (Sudibyo Alimoeso, 2011). Sebuah keluarga dengan dua anak dan berpenghasilan pas-pasan, tentu akan lebih mudah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya dibandingkan keluarga yang anaknya banyak. Keluarga dengan kondisi sosial ekonominya rendah dan anaknya banyak, tentu akan sulit mewujudkan peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraannya.

Tabel 2.

Persentase Wanita Usia Subur (15-49 tahun) Berstatus Miskin Yang Menggunakan Alat KB, Tahun 2021



Berdasarkan hasil olah Susenas Maret 2021, Wanita Usia Subur berstatus Miskin yang menggunakan alat KB ada sebanyak 65,66 persen dan masih ada 34,34 persen sisanya yang tidak menggunakan alat KB. Sebanyak 34,34 persen wanita usia subur yang berstatus miskin masih belum menggunakan alat KB tentunya masih terlalu banyak untuk mendukung keberhasilan program pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

<https://jakarta.bps.go.id>

<https://jakarta.bps.go.id>

Daftar Pustaka

- Coleman, J. 1999. ***Social Capital in the Creation of Human Capital***. Cambridge: Harvard University Press.
- Burt, R.S. 1992. ***Excerpt from The Sosial Structure of Competition, in Structure Holes: The Social Structure of Competition***. Cambridge and London: Harvard University.
- Field, John. 2010. ***Modal Sosial***. Bantul: Kreasi Wacana.
- Hasbullah, J. 2006. ***Social Capital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia***. Jakarta: MR-United Press.
- Partha D., Ismail S. 1999. ***Social Capital A Multifaceted Perspective***. Washington DC: The World Bank.
- Damsar. 2009. ***Pengantar Sosiologi Ekonomi***. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fukuyama, Francis. 1996. ***Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity***. New York: Free Press Paperback.
- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2011. ***Pengantar Sosiologi***. Jakarta: Kencana.
- Robison, LJ, Marcelo, E.S. dan Songqing, J. 2011. ***Social Capital and Then Distribution of House hold Income in The United States: 1980, 1990, and 2000***. The Jurnal of Socio Economics 40.
- Mawardi, M.J. 2007. ***Peranan Social Capital Dalam Pemberdayaan Masyarakat***. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam.
- Woolcock, M. 2001. ***The Place of Social Capital in Understanding Social and Economic Outcomes***. ISUMA Canadian Journal of Policy Reseach Vol 2.

DATA
MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Salemba Tengah No. 36-38 Paseban Senen Jakarta Pusat, 10440
Telepon: (021) 31928493; Fax: (021) 3152004
Email: bps3100@bps.go.id; Homepage: <https://jakarta.bps.go.id>